

OPTIMALISASI PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

¹Ryda Arum Meilina, ²M. Fadhillah Harnawansyah, ³Suramto

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

³Program Studi Administrasi Publik, Universitas Musi Rawas

Email: rydaarum11@gmail.com

ABSTRACT

The objective of this research is to determine the role of the national unity and politics agency in implementing political education in the scope of Lubuklinggau south Sumatera province towards the community in regard with the importance of political education, community responsibility and rights as the citizen. A qualitative method was used in this research. Observation and interview were used as primary data and relevant document was used as secondary data. Data collected technique was carried out through conducting preliminary study, informal interviews, and studying relevant documents. Data was analyzed through reduction, display, and verification. The research showed that the unity and politics agency already carried out its role in political education of the community in the level of sufficient. The community's mind set, perception, understanding, and weak participation were the impacts of implementation the political education. Hence, the national unity and politics agency of Lubuklinggau attempt to carry out sustainable program of political education towards the community.

Keywords: Optimal, Political Education

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menyampaikan secara lebih mendalam mengenai pentingnya suatu pendidikan politik kepada masyarakat yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Lubuklinggau. Pendidikan politik merupakan suatu proses pemahaman dan pembelajaran mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis data yang diperoleh secara primer melalui observasi dan wawancara dengan informan yang terlibat kemudian dapat memberikan suatu informasi terkait dengan penelitian dan data sekunder yang diperoleh berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau cukup optimal, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti pola pikir, sudut pandang, kesadaran, dan partisipasi dari masyarakat yang masih kurang terhadap perkembangan politik. Akan tetapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau terus berupaya dalam menyampaikan pendidikan politik ini sehingga hasilnya menjadi maksimal dikemudian hari

Kata kunci: Optimalisasi, Pendidikan Politik

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 menyatakan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik merupakan suatu upaya pembinaan maupun bimbingan baik secara disengaja ataupun tidak untuk meningkatkan pengetahuan tentang politik sehingga memiliki rasa keterikatan terhadap bangsa dan negara yang kemudian dapat menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem pada politik agar mampu bertanggung jawab dan berpartisipasi mencapai tujuan politik. Pendidikan politik bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang bisa memiliki peran dan posisi diri dalam budaya politik Pancasila sehingga terciptanya suatu suasana demokrasi yang mengharuskan partisipasi warga negara terbentuk dari Pancasila. Pendidikan politik juga sebagai aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Hal ini mencakup keyakinan konsep yang mempunyai muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap perilaku politik.

Menurut Kartono (2009, h.65-66) pada hakekatnya pendidikan politik merupakan suatu aktivitas mendidik diri sendiri secara terus menerus. Dengan begitu, pendidikan politik merupakan proses belajar bukan hanya untuk menambah informasi dan pengetahuan, tetapi menekankan kemampuan mewas situasi secara kritis, menentukan sikap

yang benar dan melatih ketelitian dalam berbuat sesuatu. Pendidikan politik sebagai peningkatan kesadaran berpartisipasi dalam politik dan inisiatif warga negara dalam melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tertulis dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang pola pembinaan dan pengembangan pendidikan politik generasi muda ialah rangkaian dari usaha untuk meningkatkan kesadaran politik dan kewarganegaraan guna untuk menunjang kelestarian dari pada pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan pendidikan politik sebagai '*agent of change*' masyarakat juga sebagai generasi penerus untuk bisa memberikan pengaruh politik, dan aktif dalam proses pembangunan politik agar menjadi sarana untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah menjadi lebih baik lagi.

Pada tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau telah melaksanakan pendidikan politik dengan dihadiri oleh 100 peserta baik itu dari kalangan organisasi masyarakat (ORMAS) maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tujuan kegiatan tersebut memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang organisasi kemasyarakatan agar masyarakat ikut menjaga stabilitas wilayah karena hal tersebut merupakan modal utama agar terciptanya Lubuklinggau yang metropolis dan madani. Dan pada bulan Juni tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau melaksanakan pelatihan bagi lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan organisasi

kemasyarakatan dan pemuda dengan tujuan bisa menimbulkan semangat berorganisasi antara ORMAS dan LSM yang diharapkan nantinya bisa bekerjasama antara pemerintah dengan lembaga itu sendiri.

Pelaksanaan pemilihan umum dibeberapa daerah di Indonesia dinilai masih mengalami permasalahan yaitu berupa tingginya tingkat golongan putih (golput) karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja dari partai politik maupun individu yang dicalonkan. Partisipasi politik juga masih terancam dalam adanya politik uang atau '*vote buying*' untuk mempengaruhi proses pemilihan seseorang menjadi pemimpin. Untuk menangani semua permasalahan tersebut pemerintah harus mengurangi angka golput dengan cara memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar lebih memahami apa itu politik dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melakukan *vote buying*, dengan hal itu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan sosok pemimpin akan menjadi meningkat. Sikap dan partisipasi masyarakat yang berlandaskan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban politiknya dalam memilih calon pemimpin, dapat memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan suatu wilayah.

Pendidikan politik mempunyai peranan yang penting terhadap sikap nasionalisme dan partisipasi warga negara dalam menyalurkan aspirasi. Observasi telah dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 kepada beberapa masyarakat di daerah Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur 2 dan pada tanggal 30 November, 8 Desember, 10 Desember, dan 24 Desember 2021 di Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau menunjukkan bahwa permasalahan yang ditemui adalah masih banyak masyarakat khususnya yang berusia 17-21 tahun belum begitu memahami apa itu pendidikan politik dan hak politik yang sebenarnya. Faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut adalah rata-rata masyarakat di daerah tersebut tidak begitu mengikuti informasi yang terkait dengan politik, kurangnya minat dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, cenderung tidak memilih jurusan pendidikan yang mengarah ke politik, dan banyak yang berfikir bahwa politik hanya sebatas pemilihan umum saja. Melihat permasalahan tersebut, maka perlu penanganan serius dari pemerintah khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau dalam menindaklanjuti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap politik, karena masyarakat merupakan penyalur aspirasi dengan cara berpolitik dan mengawasi setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah serta memiliki kesadaran bahwa partisipasinya sebagai warga negara merupakan hal penting untuk kehidupannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti optimalisasi pendidikan politik masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu "bagaimana optimalisasi pendidikan politik masyarakat yang dilakukan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau?"

Batasan Masalah

Penelitian membatasi pada pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau di wilayah Kelurahan Cereme Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui apa saja program prioritas yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau dalam melaksanakan pendidikan politik, mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat, yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya yaitu sebagai pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan wawasan bangsa, kewaspadaan, pembinaan masyarakat dan politik dalam negeri, dan mengetahui dampak yang terjadi jika kurang memahami arti penting dari pendidikan politik.

TINJAUAN PUSTAKA

Optimalisasi

Menurut Winardi (2015, h.7) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah suatu usaha untuk memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa optimalisasi dapat diwujudkan apabila dalam usaha mewujudkannya dengan cara yang efektif dan efisien agar menjadi optimal.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka optimalisasi pendidikan politik adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu hasil sesuai dengan tujuan dalam hal politik. Begitu juga dalam hal pendidikan politik, optimalisasi sangat diperlukan agar maksimalnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan politik untuk semua kalangan masyarakat agar terciptanya tatanan negara yang demokratik.

Pendidikan Politik

Budiardjo (2008, h.15) politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke kehidupan bersama yang lebih harmonis. Gaffar (2006, h.101) menyatakan bahwa keyakinan akan kemampuan seseorang merupakan kunci bagi sebuah sikap politik, dan keyakinan akan kemampuan tersebut merupakan kunci bagi terbentuknya dan terpeliharanya demokrasi. Pengertian diatas diartikan bahwa masyarakat harus mempunyai keyakinan serta kemampuan untuk terlibat dalam setiap proses politik, karena manusia atau masyarakat merupakan komponen utama dalam proses politik. Pendidikan politik tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa suatu usaha dan sosialisasi politik, sosialisasi inilah yang merupakan instrument pendukung utama dalam penyebaran pendidikan politik.

Alfian (1992 h. 302) mengatakan bahwa pendidikan politik sebenarnya adalah proses sosialisasi politik yang dilalui anggota-anggota masyarakat kecil sampai dewasa. Selanjutnya menurut Efriza (2008 h.11) keberadaan politik sebagai suatu ilmu pengetahuan memberikan banyak manfaat bagi

kehidupan manusia, sebab dengan demikian akan mempermudah manusia untuk memahami gejala-gejala politik yang terjadi dan membuat sebuah penelitian dalam rangka menemukan penemuan baru dalam menghadapi perkembangan dinamika kehidupan berpolitik. Maka dari itu, pendidikan politik memiliki unsur-unsur penting yang berkaitan dengan nilai moral manusia. Misalnya tatanan terhadap suatu aturan maupun hukum yang berlaku, mementingkan kepentingan publik, menangani suatu kebijakan secara terstruktur, dan pro kepada masyarakat luas. Menurut Quraishi dan Rahman (2009, h.31-32) *“Political education is the constant flow of information in a manner that encourages critical analysis of issues regarding the political system and the concept of politics.”* Bahwa pendidikan politik merupakan suatu aliran informasi yang konstan dengan cara mendorong analisis kritis terhadap isu-isu mengenai sistem politik dan konsep politik. Sebagai sebuah kajian yang komprehensif, pendidikan politik sebagaimana dikatakan Gatara (2009, h.198) dimaknai sebagai "proses penyadaran dan pendewasaan politik para anggota masyarakat. Disini, para anggota masyarakat diharapkan menjadi insan yang "melek politik". Lebih lanjut menurut Kartono (2009 h.79) menjelaskan bahwa pendidikan politik mendorong orang untuk melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap jaringan-jaringan politik dan kemasyarakatan yang menganalisis dan membahas konflik-konflik aktual dengan kemampuan yang dimiliki rakyat. Dari uraian tersebut diartikan bahwa pendidikan politik juga meliputi perasaan politik yang loyalitas, serta menambah

wawasan yang kemudian dapat menyebabkan kesadaran terhadap proses dan sikap politik agar manusia dapat memberikan kontribusi politik yang aktif dikalangan masyarakat.

Tujuan Pendidikan Politik

Pendidikan politik ini merupakan suatu kegiatan yang dapat terus berkelanjutan sepanjang hidup setiap manusia dan hal itu tidak akan terwujud secara penuh kecuali kepada sebuah masyarakat yang bebas. Ruslan (2000, h.61) tujuan dari pendidikan politik adalah untuk menumbuhkan kepribadian politik sebagaimana juga bertujuan untuk membentuk kemampuan berpartisipasi dalam politik, agar individu menjadi partisian yang positif dalam politik. Tujuan pendidikan politik juga tercantum dalam pasal 31 UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan politik adalah meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam berpolitik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik memiliki tiga tujuan utama yaitu:

1. Membentuk kepribadian politik dalam suatu individu

Pendidikan politik secara tidak langsung membentuk kesadaran setiap individu untuk berpolitik di masyarakat. Karena nilai kualitas demokrasi di Indonesia tergambar dalam suatu sikap kedewasaan dan kesadaran individu dalam berpolitik.

2. Menumbuhkan kesadaran terhadap politik

Kesadaran dalam politik dapat dijadikan sebagai suatu sudut pandang

yang berbeda untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

3. Meningkatkan partisipasi terhadap politik

Ikut serta secara aktif dalam kehidupan **berpolitik** seperti mengikuti proses berjalannya pemilihan umum untuk memilih, dan menghargai setiap perbedaan untuk memilih seorang pemimpin dimasyarakat.

Fungsi Pendidikan Politik

Secara garis besar fungsi dari pendidikan politik adalah meningkatkan pemahaman serta pengetahuan agar mereka (masyarakat) dapat menyalurkan aspirasi dan partisipasi dengan baik dalam hal berpolitik. Menurut tugas pokok serta fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau. Fungsi pendidikan politik terkhusus pada bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan. Karena sesuai dengan tugasnya dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokratis, dll. Maka dari itu fungsinya adalah sebagai :

1. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota

2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi

politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota;

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota;

4. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota;

5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota.

Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada optimalisasi pelaksanaan pendidikan politik masyarakat pada Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau. Yang mana optimalisasi merupakan suatu komponen utama yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan agar menjadi maksimal.

Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan terhadap masalah-masalah yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini, sehingga dapat memudahkan dalam mengimplementasikan tujuan penelitian di lapangan. Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam mempersempit penelitian ini adalah :

- 1) Penanaman nilai-nilai politik kebangsaan yaitu menumbuhkan kesadaran dan juga meningkatkan kepribadian dalam berpolitik sebagai warga negara.
- 2) Menurut Kartini Kartono (2009 h.79) pendidikan politik mendorong orang untuk melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap jaringan-jaringan politik dan kemasyarakatan menganalisis dan membahas konflik-konflik aktual dengan kemampuan yang dimiliki rakyat.

Sosialisasi formal dan non formal, adalah suatu usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan kepada individu maupun kelompok sehingga menjadi bagian dari masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Karena metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan menggambarkan, menganalisa, dan

mengetahui kejadian yang akan diteliti dilapangan secara nyata tanpa di manipulasi yang kemudian dapat disimpulkan secara singkat dan menjadi sebuah data yang akan menjawab dan menjelaskan secara mendalam mengenai sebuah permasalahan yang akan diteliti. Metode penelitian ini dipilih karena dapat menyajikan data secara faktual, sistematis, dan akurat dengan memanfaatkan wawancara yang bertujuan dapat mengetahui dan menggali informasi sesuai dengan fakta yang ada mengenai optimalisasi pendidikan politik masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Lubuklinggau. Lebih lanjut kualitatif menurut Sugiyono (2016 h.6) adalah penelitian yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto sehingga tidak menekankan pada angka. Kualitatif adalah penelitian yang naturalistik karena jenis penelitian ini dilakukan pada kondisi objek yang alamiah (*natural setting*).

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Jenis data tersebut berupa hasil dari observasi yang telah dilaksanakan, wawancara dan kemudian dokumentasi.

Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dilapangan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder, merupakan data pendukung yang telah diolah terlebih dahulu. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa catatan dan laporan yang diperoleh dan kemudian dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang ada. Dalam hal ini, peneliti mengambil data dari kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2016 h.224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2016 h.300) penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *purposive sampling*. Peneliti menetapkan informan sebanyak 15 orang, yang diharapkan dapat membantu dalam mendapatkan informasi mengenai pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau.

Tabel 1. Informan Penelitian

Jenis Informan	Status/ Informan	Jabatan
1. Informan Kunci		Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau

2. Informan Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Lubuklinggau Camat Lubuklinggau Timur II Lurah Cereme Taba Balai Latihan Kerja dan Widyaaiswara Ketua RT 01, 04, 09 (3 orang) Tokoh & Masyarakat Umum (7 orang)
-----------------------	--

Sumber: Peneliti 2022

3.1. Aspek Penelitian

Tabel 2. Aspek Penelitian

Variabel Penelitian	Aspek	Sub Aspek
Optimalisasi Pendidikan Politik Masyarakat Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau	1. Penanaman Nilai-Nilai Politik Kebangsaan	1. Individu 2. Kelompok
	2. Pembahasan Permasalahan / Konflik yang Aktual Di Masyarakat	1. Diskusi Publik 2. Resolusi Konflik
	3. Sosialisasi	1. Formal 2. Non Formal

Sumber: peneliti, 2022

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016 h.246) analisis data adalah kegiatan dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Secara sistematis analisis data dilakukan dengan 3 langkah :

1. Reduksi Data

Reduksi data dalam rencana penelitian ini yaitu proses pemilihan, penyerderhanaan, suatu transformasi data kasar menjadi data halus yang muncul dari catatan dilapangan selama meneliti. Yakni suatu kegiatan yang membuat ringkasan saat menelusuri tema dari penelitian yang dilakukan dilapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif dan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan. Penyajian dan dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

3. Menarik Kesimpulan

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian terkumpul, selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga data yang sudah terkumpul akan dibandingkan dengan peristiwa maupun hasil observasi dan wawancara dengan informan yang telah dilakukan. Dan kemudian menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian, maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanaman Nilai-Nilai Politik Kebangsaan

Individu

Berdasarkan hasil observasi penelitian, dalam aspek

penanaman nilai-nilai politik kebangsaan terhadap individu, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa masyarakat yang belum memahami contoh dari nilai-nilai politik kebangsaan dikehidupan sehari-hari. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa nilai-nilai politik hanya batas pemilihan umum dan partai politik saja. Minat serta pemahaman masyarakat yang masih rendah juga mempengaruhi dalam hal ini. Pentingnya merubah pola pikir dan sudut pandang agar tiap masyarakat lebih memaknai secara mendalam bagaimana pentingnya menanamkan nilai-nilai politik dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini juga bertujuan menentukan bagaimana nasib suatu negara maupun bangsa di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat diverifikasi bahwa penanaman nilai-nilai politik kebangsaan terhadap individu harus terus ditanamkan dan ditingkatkan sejak dini, karena hal ini sangat mempengaruhi tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dalam menentukan sikap terkait setiap keputusan yang akan diambil dan dipertanggungjawabkan di masa yang akan datang.

Kelompok

Berdasarkan hasil observasi penelitian dalam aspek penanaman nilai-nilai politik kebangsaan terhadap kelompok, peneliti menemukan bahwa ada beberapa kelompok masyarakat yang sudah memahami nilai-nilai politik kebangsaan dan diterapkan di kelompoknya sesuai dengan bidang masing-masing. Seperti pada kelompok Ibu PKK, kelompok paguyuban PUJASUMA, dan kelompok IRMAS. Penanaman nilai politik terhadap

kelompok ini harus terus ditingkatkan sehingga nantinya dapat disampaikan dan dijadikan contoh kepada kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang sama sekali belum mengenal nilai-nilai politik kebangsaan dalam bermasyarakat. Dengan kompaknya tiap-tiap kelompok masyarakat dalam menanamkan nilai politik kebangsaan, maka dapat menciptakan lingkungan yang aman dan tenram.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diverifikasi bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Lubuklinggau telah berupaya dalam menyampaikan nilai-nilai politik kebangsaan baik terhadap individu maupun kelompok melalui kegiatan yang dilaksanakan pada waktu tertentu seperti sosialisasi kepada masyarakat kelurahan/kecamatan, kelompok Ibu PKK dan tokoh-tokoh dalam masyarakat.

Pembahasan Permasalahan / Konflik yang Aktual di Masyarakat

Diskusi Publik

Berdasarkan hasil observasi penelitian, dalam aspek ini peneliti menemukan bahwa pelaksanaan diskusi publik dilakukan pada saat-saat tertentu dan berkaitan dengan peristiwa penting yang memang harus dibahas. Diskusi publik bertujuan untuk mengumpulkan atau mempertemukan beberapa masyarakat, tokoh masyarakat, dan beberapa aparatur pemerintah lainnya untuk membahas suatu permasalahan maupun peristiwa yang sedang beredar di kalangan masyarakat. Diskusi publik ini harus dilaksanakan demi menciptakan ketentraman masyarakat agar tidak terjadinya konflik yang kemudian dapat merugikan banyak pihak.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diverifikasi bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau pernah melakukan diskusi publik ini namun tidak sering karena diskusi publik dilaksanakan apabila ada suatu persoalan penting atau isu yang harus dibahas terkait dalam bidang politik dalam masyarakat, biasanya hanya dilaksanakan 1-2 kali dalam satu tahun di tempat pertemuan / instansi pemerintahan yang turut hadir dalam diskusi. Selain daripada hal tersebut, maka diskusi publik ini jarang dilakukan.

Resolusi Konflik

Berdasarkan hasil observasi penelitian, dalam aspek ini peneliti menemukan bahwa resolusi konflik juga tidak sering dilaksanakan karena tidak sering terjadi konflik besar dimasyarakat. Konflik biasa terjadi ketika adanya peristiwa besar tertentu, apabila ada suatu permasalahan besar yang aktual dimasyarakat maka harus segera diatasi makan resolusi konflik harus segera dilaksanakan. Tetapi sejauh ini resolusi konflik tidak sering dilaksanakan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diverifikasi bahwa permasalahan atau konflik yang terjadi dimasyarakat itu umumnya terjadi ketika hanya memasuki tahun-tahun pemilu dan peristiwa tertentu, untuk konflik besar dikalangan masyarakat itu sangat jarang terjadi. Apabila memang terjadi konflik, dalam resolusi atau penyelesaiannya pun tidak perlu melibatkan pihak tertentu dan hanya melibatkan 2 pihak yang berseteru. Hal ini dikarenakan akan berhenti dengan sendirinya. Tetapi jika permasalahan tersebut sudah merugikan banyak pihak, maka pihak yang berwajib dan yang berkaitan harus ikut terlibat dalam

mengatasi permasalahan ini agar tidak berkepanjangan.

Menerapkan Pendidikan / Pembelajaran

Sosialisasi Formal

Berdasarkan hasil observasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau sejauh ini belum pernah memasukkan / menerapkan pembelajaran mengenai pendidikan politik dikalangan siswa sekolah maupun mahasiswa. Karena menurut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menerapkan pembelajaran secara formal mengenai politik itu biasanya disampaikan melalui pihak yang lebih kompeten dibidangnya contohnya adalah guru mata pelajaran PPKN atau dosen mata kuliah yang sangat paham dengan ilmu politik.

Berdasarkan data hasil observasi dan dokumentasi, dapat diverifikasi bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau tidak menerapkan pembelajaran maupun kurikulum mengenai pendidikan politik. Karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan atau menyampaikan pendidikan politik secara langsung kepada masyarakat umum. Dan mengenai pendidikan politik dibangku sekolah maupun kuliah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak mempunyai hak serta wewenang untuk menerapkannya karena itu merupakan tugas dari pengajar maupun pendidik.

Sosialisasi Non Formal

Berdasarkan hasil observasi, dalam aspek ini peneliti menemukan bahwa pendidikan politik hanya disampaikan melalui sosialisasi non formal. Sosialisasi non formal ini terbuka untuk masyarakat luas, dengan tujuan

agar masyarakat dapat mengenal lebih dalam arti pentingnya nilai politik.

Berdasarkan data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat diverifikasi bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau belum menyeluruh dalam melakukan sosialisasi yang bersifat non formal kepada masyarakat, khususnya di kelurahan Cereme Taba dikarenakan kurangnya komunikasi dan informasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau kepada masyarakat, serta minat dan partisipasi masyarakat juga cenderung kurang mengenai pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik ini. Sehingga yang ikut hadir dalam pelaksanaan sosialisasi ini, mayoritasnya hanya aparat pemerintahan dan tokoh masyarakat saja. Materi yang biasanya disampaikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau ketika mengadakan sosialisasi contohnya seperti tentang bahaya narkoba, dampak covid, peran kepemimpinan, pentingnya kerukunan antar umat beragama dan ketika memasuki tahun pemilu maka materi yang disampaikan akan memfokuskan bagaimana pentingnya pemilu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pendidikan politik masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau cukup optimal. Simpulan ini didasarkan pada sub-sub aspek-aspek yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau khususnya pada bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Umum kepada masyarakat, dari keenam sub aspek tersebut yang dinilai masih kurang

yaitu 3 sub aspek yaitu penanaman nilai politik kebangsaan terhadap individu, sosialisasi formal dan non formal. Hal itu juga dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran maupun pemahaman, dan partisipasi masyarakat terhadap perkembangan politik dalam kehidupan berbangsa. Tidak sedikit juga masyarakat yang masih mempunyai *mindset* bahwa pendidikan politik hanya membahas dan dilaksanakan pada saat Pemilu saja, padahal pendidikan politik ini seharusnya harus ditanamkan sejak dini mungkin demi keberlangsungan suatu bangsa yang berkualitas dimasa depan.

Pada aspek penanaman nilai-nilai politik kebangsaan terhadap individu maupun kelompok, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau terus berupaya sebaik mungkin dalam membantu menyampaikan nilai-nilai politik kebangsaan sesuai dengan bidang kerja masing-masing yang tercantum di struktur organisasi. Hanya saja tingkat kesadaran masyarakat dinilai masih kurang yang juga mempengaruhi dalam hal ini. Pada aspek pembahasan permasalahan / konflik yang aktual di masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau juga sudah bekerja dengan sangat baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya konflik besar yang menimbulkan kerugian dilingkungan dimasyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga siap melakukan diskusi publik apabila ada suatu permasalahan penting yang harus segera dibahas dan diselesaikan. Pada aspek terakhir yaitu menerapkan pembelajaran / pendidikan melalui sosialisasi formal dan non formal, Badan Kesbangpol Kota Lubuklinggau hanya menggunakan sosialisasi secara non formal yang terbuka untuk masyarakat

umum agar dapat mengenal nilai-nilai politik kebangsaan secara mendalam

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. 1981. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Anggraini, S.A., Siswanto, J., & Marpaung, Z. S. (2020). *Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Selatan*. Unpublished Thesis.
- Ashariadi, I. A. (2020). Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Unpublished Thesis.
- Bashori, K. (2018). Pendidikan Politik di Era Disrupsi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, No.2 Vol. 2, 287–308.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia
- Djuyandi, Y. (2018). *Pengantar Ilmu Politik*. Rajawali Pers. Depok.
- Efriza. (2009). *Ilmu Politik (Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan)*. Alfabeta. Bandung.
- Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia (Transisi Menuju Demokrasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Hasanah, N., Mulka, S. R., Yudhistira, H., Inderawaspada, I., & Rudini, R. (2021). Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Kecamatan Samarinda Utara Di Kota Samarinda. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, No. 3 Vol. 4, 446–452.

Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Politik Generasi Muda.

Kartono, K. (2009). *Pendidikan Politik*. Mandar Maju, Bandung.

Mas'oed, M. (2015). *Politik Birokrasi dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Sembiring, N.V., Isdaryanto, N., & Suhardiyanto, A (2017). Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. *Unnes Political Science Journal*, No. 2 Vol. 1, 181–191.

Nasuha, C.N., & Cholik, C.A (2019). *Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada*. No. 8 Vol. 1, 50–66.

Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, No. 1 Vol. 6, 141–152.

Pedoman Penulisan Proposal, Penelitian dan Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musi Rawas 2021. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, Lubuklinggau. Fisipol UNMURA.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Peraturan Wali Kota No. 31 tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau.

Rahman, A., & Suharno, S (2020). Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, No.2 Vol. 4, 282.

Sainab, S., Suaib, MR, & Purnomo, A. (2019). Peningkatan Wawasan Kebangsaan Di Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Dan Linmas) Kota Sorong. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(4), 14–23.

Sarnoto, A. Z (2013). Konsepsi politik pendidikan di Indonesia. *Jurnal*

Educhild: Pendidikan Sosial Dan Budaya, No. 1 Vol. 1, 30–40.

Sitepu, E (2016). Peranan Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Yang Berkarakter Terhadap Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Research Sains*, No. 1 Vol. 2, 1–8.

Sudira, I. N. (2021). Resolusi Konflik Dalam Perubahan Dunia. Global: *Jurnal Politik Internasional*, 19(2), 156-171.

Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Pengertian Pendidikan Politik.